

PERIKANAN DAERAH

Bisnis Ikan Invasif Masih Ditemukan

BANTUL—Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bantul masih menemukan masyarakat yang memelihara ikan invasif meski sudah ada larangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan soal pembudidayaan dan perdagangan 75 jenis ikan invasif.

Pengawas Perikanan Ahli Muda DKP Bantul Irawan Waluyo Jati memaparkan instansinya masih menemukan perdagangan ikan invasif. Padahal, aturan larangan perdagangan dan pembudidayaan ikan invasif telah ada sejak beberapa tahun lalu.

Pada September, DKP menemukan ada pedagang yang menjual 29 ekor ikan piranha padahal jenis ikan tersebut masuk dalam ikan yang dilarang untuk diperdagangkan dan dibudidayakan.

"Ikan tersebut kemudian dimusnahkan," ujarnya, Rabu (9/10). Selama 2023, DKP juga menemukan beberapa pedagang yang menjual ikan invasif. Pedagang yang didapatkan menjual ikan invasif pun telah diberikan sanksi denda.

Sanksi bagi pelaku yang memelihara ikan invasif di Indonesia berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. Sanksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU No.31/2004 tentang Perikanan.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.19/PERMEN-KP/2020, telah diatur mengenai 75 jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan dan dibudidayakan. Puluhan jenis ikan tersebut dilarang diperdagangkan dan dibudidayakan lantaran dinilai membahayakan atau merugikan pengelolaan perikanan di Indonesia.

Jenis ikan yang dilarang tersebut merupakan ikan yang memangsa ikan spesies lain sehingga dapat mengancam penurunan populasi ikan lainnya. Lantaran mengandung racun, bersifat parasit, melukai atau membahayakan keselamatan manusia.

Untuk mengantisipasi perdagangan ikan invasif, DKP menggelar pengawasan secara langsung ke toko-toko ikan hias. "Kami [DKP] juga berupaya mengawasi perdagangan ikan invasif melalui media sosial," tutur Irawan.

Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan DKP DIY Veronica Vony Rorong meminta masyarakat untuk menyerahkan ikan invasif tersebut secara sukarela kepada pemerintah agar tidak kena sanksi.

"Jangan dibuang ke sungai [ikan invasif] karena dapat mengganggu keseimbangan dan merusak ekosistem," paparnya. (Stefani Yulindriani)

LRI UMY

63 Hasil Penelitian Layak Diterapkan

Lembaga Riset dan Inovasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LRI UMY) menyelenggarakan Diseminasi Hasil Penelitian Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) 2024 di Dasron Hamid Research and Innovation Center, UMY, Rabu (9/10), dan diharapkan hasil penelitian dapat diterapkan pemerintah dan masyarakat.

Kepala LRI UMY, Profesor Dyah Mutiarni, memaparkan diseminasi hasil penelitian tersebut dilakukan untuk menyebarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa UMY.

Penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa UMY tersebut fokus menyortir beberapa persoalan yang ada di Indonesia dengan melihat realita persoalan yang ada di lapangan dan teori yang ada.

Penelitian itu antara lain terkait dengan ekonomi hijau, ekonomi biru, wisata hijau, digital governance, kesehatan dan pengelolaan keuangan. Topik-topik tersebut sengage diteliti untuk menemukan solusi atas

persoalan yang ada. "Hasil penelitian dosen dan mahasiswa UMY ini bisa diaplikasikan pemerintah dan masyarakat. Dapat menjadi solusi atas persoalan yang dialami pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam mewujudkan good governance," ungkapnya, kemarin.

LRI UMY juga bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan untuk menyempurnakan penelitian tersebut, antara lain Pemda DIY, pemerintah kabupaten/kota di DIY dan beberapa kementerian. Masyarakat juga dapat menerapkan hasil penelitian tersebut lantaran beberapa penelitian dilakukan dengan meneliti kondisi di masyarakat.

Satu Data
Di agenda itu, Profesor Dyah memaparkan hasil penelitian bertajuk *Desain Interoperabilitas Data Ketenagakerjaan dalam Mendukung Satu Data Ketenagakerjaan pada Level Kementerian dan Pemerintah Daerah*. Dari penelitian itu, dia menegaskan

kolaborasi dan koordinasi perlu terus ditingkatkan untuk memastikan keselarasan dalam pengelolaan data ketenagakerjaan sehingga Satu Data Ketenagakerjaan menjadi sistem andal dan terintegrasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data di tingkat regional dan nasional.

Ketua Tim Pengusul UMY, RR. Sabtanti Harimurti, membuat penelitian *Simplex Lattice Design untuk Optimasi Crosslink Amilosa-amilopektin dan Alginat sebagai Cangkang Kapsul Alternatif*. Dalam penelitian tersebut dilakukan pembuatan cangkang kapsul dengan menggunakan campuran bahan-bahan seperti pati kedelai, alginat, glicerol, CaCl2 dan aquadest.

"Setiap bahan memiliki peranan masing-masing. Pati adalah homopolimer glukosa dengan ikatan -glikosidik yang tersusun atas dua fraksi yakni amilopektin dan amilosa. Amilopektin mempunyai sifat granuler yang mengembang serta daya pengikat yang baik, sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan



Harian Jogja/Stefani Yulindriani

cangkang kapsul pengganti gelatin," ujarnya.

Dalam acara tersebut diselenggarakan pula *Seminar Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia bertajuk Kepemimpinan di Masa Krisis di Pemda DIY*.

Gaya Komunikasi

Pemateri acara tersebut, dosen Ilmu Pemerintahan UMY, Erni Zuhriyati, menuturkan pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai

sektor yang ada. DIY mengalami kerugian di sektor pariwisata sebesar Rp67,04 miliar pada April 2020, penurunan pendapatan UMKM mencapai 80% dan ada 1.465 orang pekerja yang terkena PHK. Meski begitu, Pemda DIY berhasil mengatasi dampak tersebut dengan berbagai kebijakan yang ada lewat sinergitas dengan berbagai pihak untuk pengembangan ekonomi kreatif dan inovasi teknologi ICT, termasuk mendukung pembiayaannya, seperti melalui

program dana sosial perusahaan. Pemateri lainnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY, Tri Saktiyana, memaparkan gaya komunikasi yang tepat dalam menyebarkan informasi mengenai pandemi menjadi kunci kepemimpinan masa Covid-19. Pimpinan daerah di Pemda DIY harus mampu mengomunikasikan informasi dengan benar tanpa membuat masyarakat resah. (Stefani Yulindriani/*)



Pengendara melintasi kawasan Panggung Krapyak, Kapanewon Sewon, Rabu (9/10). Panggung Krapyak yang masuk ke dalam Sumbu Filosofi Jogja rencananya akan terus ditata Pemerintah Kabupaten Bantul agar lebih menjadi pariwisata berkualitas.

Harian Jogja/Stefani Yulindriani

MUSIM KEMARAU

Kekeringan Tak Separah 2023

BANTUL—Dampak kekeringan akibat musim kemarau panjang pada tahun ini tidak seperti kekeringan yang melanda daerah ini pada 2023.

Abdul Hamid Razak
hamid@harianjogja.com

Komandan Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops BPBD) Bantul Aka Luk Luk Firmansyah mengatakan berdasarkan analisisnya, bencana kekeringan di Bantul tidak separah tahun lalu.

"Kalau menurut analisis kami, mudah-mudahan kekeringan tidak seperti tahun lalu, karena saat ini saja sudah di fase musim peralihan dari kemarau ke musim hujan," katanya, seperti dikutip dari Antara, Rabu (9/10).

Salah satu faktor penyebab kekeringan

▶ Saat ini saja sudah di fase musim peralihan dari kemarau ke musim hujan.

▶ Penyaluran air bersih ke wilayah terdampak kekeringan di Bantul masih tetap berlanjut.

dampak kemarau pada 2023 yang lebih luas dibandingkan dengan tahun ini karena fenomena El Nino pada tahun lalu, yang mempengaruhi musim kemarau lebih kering.

Dampak kemarau panjang pada tahun ini, hingga Oktober setidaknya telah berakibat pada masyarakat di delapan kecamatan yang mengalami kesulitan air bersih sehingga butuh bantuan *dropping* air dari BPBD Bantul.

Pada 2023 berdasarkan infografis penyaluran air bersih wilayah Bantul, hingga akhir Desember, masyarakat di sebanyak 11 kecamatan perlu mendapat bantuan distribusi air bersih dari pemerintah.

"Kalau di 2024 sampai Oktober ini penyaluran air masih berlanjut namun

kalau dibandingkan sampai akhir 2023, kemungkinan jauh. Karena saat ini saja, sudah masuk musim peralihan," tutur Firmansyah.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bantul Antoni Hutagaol mengatakan, penyaluran air bersih ke wilayah terdampak kekeringan di Bantul masih tetap berlanjut karena prediksi mulai turun hujan di wilayah DIY termasuk Bantul pada akhir Oktober.

"Warga diimbau tetap menjaga kesiapsiagaan dalam menghadapi kekeringan, gunakan air bersih secara bijak sesuai kebutuhan yang utama, dan tetap saling sepekan dengan sesama saudara sekitar yang membutuhkan," katanya. (JIBI/Antara)

LINTAS PROJO

Hindari Sepeda Ayun, Mobil Terbalik

BANTUL—Sebuah mobil Toyota Innova terbalik setelah sempat oleng lantaran pengemudinya membanting setir menghindari sepeda ayun.

Kepala Seksi Humas Polres Bantul Ajun Komisaris Polisi I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan insiden terbaliknya Innova berpelat nomor AA1760BL itu terjadi di Jalan Lapangan Mojo-Jemer, Kalurahan Donotirto, Kapanewon Kretek, Selasa (8/10) sekitar pukul 07.00 WIB. Kecelakaan lalu lintas berawal saat mobil Toyota Innova No. Pol. AA 1760 BL melaju dari arah selatan ke utara. Kemudian sampai di lokasi kejadian menghindari sepeda ayun di depannya.

"Pengemudi banting setir ke kanan lalu masuk selokan kemudian banting kiri sehingga kendaraan terbalik," tuturnya dalam keterangan tertulis kepada *Harian Jogja*, Selasa (8/10). Pengemudi kendaraan nahas itu adalah MR, 21, warga Pekanbaru, Riau yang tinggal di Tirtohargo, Bantul.

Akibat kejadian tersebut, pengemudi mengalami lecet bagian di kedua tangannya dan menjalani rawat jalan. Kendaraan tersebut pun mengalami kerusakan pada kaca depan pecah, ban kanan belakang kempes, spion kanan pecah dan bodi kanan rusak. (yul)



Nomor Telepon Penting di Bantul

RSUD Panembahan Senopati	(0274) 367381
RSPAU Dr. Hardjolukito	(0274) 444702
RS Santa Elizabeth	(0274) 367502
RS PKU Muhammadiyah Bantul	(0274) 368238
PMI Bantul	(0274) 367987
Polres Bantul	(0274) 367570
Polsek Sedayu	(0274) 7164720
Polsek Kasihan	(0274) 450025
Polsek Sewon	(0274) 445585
Polsek Banguntapan	(0274) 414132
Polsek Piyungan	(0274) 653442
Polsek Dlingo	(0274) 7473216
Polsek Imogiri	(0274) 6460752